PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Nomor : 800/2773/204.3/2026 Surabaya, 28 April 2026
Sifat : Terbuka
Lampiran : Satu
Perihal : Laporan Pelaksanaan Penerapan Kebijakan Fleksibilitas Tugas Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.5/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/1141/204/2026 tanggal 27 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Fleksibilitas Tugas Kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan WFH dilakukan secara berkala guna memastikan efektivitas kebijakan, efisiensi penggunaan energi dan anggaran, serta peningkatan kinerja organisasi. Setiap perangkat daerah wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan listrik, air, telepon kantor, serta operasional kantor lainnya secara berkala selama pelaksanaan WFH, termasuk penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan Dinas dan kendaraan pribadi pegawai ASN.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dimohon seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengisi dan mengunggah laporan pelaksanaan WFH melalui tautan berikut:

1. https://tinyurl.com/LaporanWFHJatim (link unggah PDF Laporan WFH); dan
2. https://tinyurl.com/LaporanEfisiensiWFH (link *spreadsheet* capaian efisiensi).

Kedua tautan tersebut wajib diisi oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan batas waktu pengisian paling lambat setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya pukul 10.00 WIB. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Dani Mardiyana melalui WhatsApp pada nomor 081221891851.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

LAMPIRAN

Nomor : 800/2773/204.3/2026
Tanggal : 28 April 2026
Perihal : Laporan Pelaksanaan Penerapan Kebijakan Fleksibilitas Tugas Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

DAFTAR PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah;
4. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Badan Penghubung Daerah Provinsi;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Bakorwil I Madiun;
10. Bakorwil II Bojonegoro;
11. Bakorwil III Malang;
12. Bakorwil IV Pamekasan;
13. Bakorwil V Jember;
14. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;
15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
16. Dinas Kehutanan;
17. Dinas Kelautan dan Perikanan;
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
19. Dinas Kesehatan;
20. Dinas Komunikasi dan Informatika;
21. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
22. Dinas Lingkungan Hidup;
23. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan;
24. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
25. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Dinas Pendidikan;
29. Dinas Perhubungan;
30. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
31. Dinas Perkebunan;
32. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
33. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
34. Dinas Peternakan;
35. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;

36. Dinas Sosial;
37. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
38. Inspektorat Provinsi;
39. Satuan Polisi Pamong Praja;
40. Sekretariat DPRD;
41. Biro Administrasi Pimpinan;
42. Biro Organisasi;
43. Biro Umum;
44. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
45. Biro Hukum;
46. Biro Kesejahteraan Rakyat;
47. Biro Perekonomian;
48. Biro Administrasi Pembangunan;
49. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
50. RS Jiwa Menur Surabaya;
51. RSU Haji Surabaya;
52. RSUD Dr. Saiful Anwar Malang;
53. RSUD Dr. Soedono Madiun;
54. RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
55. RS Karsa Husada Batu.